

HARAPAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT PESISIR: PERSPEKTIF LOKAL TERHADAP PROGRAM CSR PT PELINDO III DI SURABAYA, INDONESIA

*HOPES AND ASPIRATIONS OF COASTAL COMMUNITIES: LOCAL PERSPECTIVES ON PT PELINDO III'S CSR IN SURABAYA, INDONESIA*¹

Muchammad Ismail²

Email: muhammad.ismail@uinsa.ac.id

Riyanto³

Email: riyanto@ub.ac.id

ABSTRACT

This study highlights Surabaya as the second-largest metropolitan city in Indonesia after the capital, Jakarta, characterized by rapid population growth and significant impacts of development on land occupancy and fishing grounds along the city's coastline. The challenges faced are not limited to areas directly affected by the construction of the Teluk Lamong Port pier but also involve local communities and coastal fishermen. The focus of this research is to explore the perceptions and experiences of local residents and coastal fishermen in Tambak Osowilangun, Surabaya, regarding the environmental impacts of the Teluk Lamong Port development, both before and after its construction. This study employs a qualitative approach with an ethnographic method, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the distribution of PT Pelindo III's Sustainable Business program at Teluk Lamong Port still faces various internal and external challenges, such as tidal flooding that threatens coastal settlements and the potential loss of living space for fishermen. The implementation of Social Impact and Corporate Sustainability programs is considered unsustainable, as it remains temporary and incidental. In striving for sustainable development, this study emphasizes the importance of collaboration between local communities and the company by integrating both ecocentric and anthropocentric approaches management.

Keywords: *aspirations, local communities, traditional fishermen, csr*

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti Surabaya sebagai kota metropolis terbesar kedua setelah Ibukota Jakarta, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan menjadi dampak

¹Diterima 15 Maret 2025, direvisi 23 Juni 2024

²Dosen FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya

³Dosen FIA Universitas Brawijaya Malang

pembangunan yang signifikan terhadap okupansi lahan serta area tangkap bagi nelayan di sepanjang pesisir kota. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada wilayah terdampak secara langsung oleh pembangunan dermaga Teluk Lamong, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal dan nelayan pesisir. Fokus penelitian ini adalah menggali persepsi dan pengalaman masyarakat lokal dan nelayan pesisir Tambak Osowilangun Surabaya terkait dampak lingkungan dari pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong sebelum dan sesudah pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi program Sustainable Business PT Pelindo III di Pelabuhan Teluk Lamong masih menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal, seperti banjir rob yang mengancam permukiman warga pesisir serta potensi hilangnya ruang hidup bagi nelayan. Implementasi program Social Impact dan Corporate Sustainability dinilai belum berkelanjutan, karena masih bersifat sementara dan insidental. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat lokal dan perusahaan dengan mengintegrasikan pendekatan ekosentris dan antroposentris.

Kata Kunci: aspirasi, masyarakat lokal, nelayan tradisional, csr

A. PENDAHULUAN

D i era revolusi industri 4.0 saat ini, program pembangunan perkotaan menjadi fokus utama perhatian publik, terutama ketika melibatkan proyek besar seperti pembangunan pelabuhan Teluk Lamong. Perusahaan yang terlibat dalam proyek ini dihadapkan pada tuntutan praktik bisnis yang etis, aspirasi akan kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan alam di sekitarnya. Meskipun sebagian besar perusahaan tersebut mengekspresikan komitmennya melalui program-program kemanusiaan dan pembangunan manusia, namun kenyataannya, dampak negatif sering

kali masih dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya (Manohar Pawar, 2014). penelitian ini mengulas dinamika kontradiktif antara program-program pembangunan perusahaan dan realitas dampak negatifnya pada lingkungan dan ekologi masyarakat.

Dari sudut pandang yang lebih kritis terhadap fenomena industrialisasi dan rezim neo-kapitalis, terungkap sisi negatif yang sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam Masyarakat (Bent Flyvbjerg, Nils Bruzelius, 2003). Dalam konteks ini, masyarakat sering kali menghadapi beban sosial dan dampak politik pembangunan yang memprihatinkan, terutama bagi

masyarakat kelas bawah atau masyarakat *grassroot*. Mereka, yang bergantung pada modal sosial sebagai sumber daya utama, yang masih mengalami kendala dalam mengakses dan memanfaatkan pantai sesuai dengan kebutuhan mereka (Michael Ekow Manuel, 2018).

Tuntutan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga telah diatur dalam Pasal 74 (Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, 2007) menunjukkan bahwa terdapat kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh perusahaan di Indonesia sebagai bagian dari regulasi perusahaan. UUPT mewajibkan industri atau korporasi untuk terlibat dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang tidak hanya mencakup kepedulian terhadap problematika ekologi, tetapi juga tanggung jawab *ethical business* terhadap warga yang merasakan efek negatif secara langsung akibat operasional korporasi. Oleh karena itu, perusahaan atau badan usaha diharapkan tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor lingkungan hidup serta aspek-aspek sosial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang (Chairil N. Siregar, 2007). Melalui CSR pada umumnya dipandang sebagai taktik manajerial yang mengintegrasikan dan menangani tantangan keberlanjutan (Kurt, 2019).

Pola pengembangan komunitas (*community development*), sebagai bentuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), masih belum umum di kalangan badan usaha saat ini (Manohar Pawar, 2014). Praktik bisnis yang bertanggung jawab dipandang sebagai kekuatan sosial yang potensial, yang dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan sebagai upaya konkret perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, serta mendorong terciptanya filosofi bisnis yang lebih inklusif (Béjia et al., 2021). Meskipun belum banyak diterapkan, pendekatan ini menawarkan potensi untuk membangun hubungan yang lebih erat antara perusahaan dan komunitas, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tingkat lokal (Suharto, 2005).

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui pendekatan *ethical business* dan *responsible business*, terutama yang berfokus pada program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat setempat, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami prioritas pemangku kepentingan lokal dan mempertimbangkannya (Richard Welford, 2007).

Salah satu dampak nyata dari pembangunan dermaga Terminal Teluk Lamong Surabaya masih dirasakan langsung oleh warga di sekitar wilayah tersebut, berupa banjir rob, kenaikan muka air laut saat pasang yang mengancam permukiman, intrusi air

laut, dan degradasi pantai. Selain itu, kelestarian biota laut seperti kerang, udang, kepiting, dan sejenisnya di sekitar muara pesisir juga mengalami penurunan, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan nelayan di kawasan pesisir.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak pembangunan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui model implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat karitatif dan finansial semata. Disisi lain diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, dengan menggabungkan perspektif ekosentris dan antroposentris yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan budaya lokal masyarakat pesisir.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal serta nelayan tradisional dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Pelindo III Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam hubungan antara masyarakat lokal dan nelayan tradisional dengan PT Pelindo III Terminal Teluk Lamong terkait pelaksanaan program CSR di wilayah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, jenis *ethnography* (Trundle; Catherinee and & Phillips, 2023). Etnografi menggambarkan studi kelompok kecil, yang bertujuan menonjolkan kegunaan pengetahuan

budaya dalam menangani problematika yang ada. Pendekatan etnografi digunakan untuk melakukan pengamatan partisipatif (meskipun terbatas) terhadap masyarakat lokal dan nelayan tradisional yang tinggal di sekitar area terdampak pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong.

Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dan secara aktif terlibat dalam menyelami dinamika kehidupan subjek yang menjadi fokus penelitian, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial yang mereka alami. Sebagaimana dikemukakan oleh Brewerton dan Millward, metode observasi semacam ini menuntut peneliti untuk terlibat secara aktif dan menjadi bagian integral dari masyarakat atau elemen-elemen yang sedang diteliti. Tujuannya adalah agar peneliti dapat meresapi pengalaman sosial secara mendalam, bahkan hingga pada dimensi mental, sehingga mampu menggambarkan sudut pandang yang autentik atau *point of view* dari subjek yang diteliti (Paul M Brewerton, 2001).

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode wawancara. Mengacu pada pandangan Wooffitt dan Widdicombe, peneliti menetapkan pedoman wawancara sebagai standar awal dan merancang tema pertanyaan yang bertujuan untuk menstimulasi sikap serta mendorong munculnya respons yang reflektif dari informan. Meskipun terdapat garis besar topik yang dibahas sepanjang proses wawancara, redaksi pertanyaan bersifat fleksibel dan tidak selalu mengikuti

catatan awal secara kaku. Sebagaimana diungkapkan, *We will go beyond context*, pendekatan ini memungkinkan eksplorasi makna yang lebih luas dan kontekstual. Oleh karena itu, pemilihan teknik *in-depth interview* dianggap sangat relevan dan bermanfaat untuk menggali tema penelitian secara lebih mendalam dan bermakna (Robin Wooffitt, 2006).

Pada tahap berikutnya, data penelitian yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan *Model Life History* (Joan Sangster, 2008). Metode ini digunakan untuk mengkodifikasi naratif kehidupan masyarakat lokal, nelayan tradisional, yang kemudian menjadi landasan untuk memahami pengalaman mereka.

Dalam karya Susan NG. Geiger menyatakan, *the life history method is characterized as an extensive account of an individual's life narrated and recorded by someone else. Subsequently, this individual edits and transcribes the life story as if it were an autobiography* (Susan N. G. Geiger, 2014). Artinya, implikasi secara konsep, dari proses interaksi pengumpulan data tersebut, selanjutnya dilakukan langkah analisa yang secara rinci.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi merujuk pada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, implementasi, pelestarian, dan pengembangan metamorfosis sosial (Loekman Soetrisno, 1995).

Pendefinisian ini menyoroti esensi kemajuan masyarakat dan

pembangunan adalah suatu proses yang dapat berhasil apabila melibatkan bukan hanya peran pemerintah yang berkuasa, melainkan juga keterlibatan aktif rakyat, terutama yang berada dalam lapisan masyarakat yang kurang berkecukupan (Johannes Muller, 2006).

Peran aktif masyarakat dalam menentukan dan melaksanakan program bantuan dari perusahaan adalah suatu keharusan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas memberikan pendapat, melainkan juga mencakup keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan suatu program. Lebih dari sekadar memberikan suara, partisipasi masyarakat mengimplikasikan penerapan bakat unik mereka untuk mendukung perkembangan perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat positif bagi seluruh komunitas (Daniel Lathrop, 2010).

Partisipasi diartikan sebagai gerakan massa yang diarahkan pada perubahan sosial, keanggotaan dalam kelompok kecil dapat mengubah bukan hanya individu, tetapi juga Masyarakat (Gastil, 1998). Definisi partisipasi menjadi dasar utama dalam perubahan sosial, sebagian besar berhubungan pada ide kemandirian masyarakat. Pada konteks diatas, keterlibatan bukan hanya menjadi suatu tujuan, melainkan juga sebuah upaya untuk mengaktifkan konsep kemandirian masyarakat, yang mencakup hak-hak mereka menjadi aktif pada proses pembangunan berbasis ekosentris dan antroposentris.

Dalam ranah konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan memiliki berbagai definisi. Menurut ISO 26000, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diartikan sebagai kewajiban badan usaha organisasi pada social impact mengacu pada dampak positif yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab tersebut menekankan upaya perusahaan dalam mendukung pertumbuhan sustainable development ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. ISO 26000 menekankan bahwa CSR membangun kemitraan yang erat dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan bersama, pentingnya perusahaan mematuhi regulasi dan hukum internasional yang berlaku, dan terintegrasi dalam struktur organisasi (Rachman, 2011).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan janji badan usaha dalam memenuhi kewajiban sosialnya. Kewajiban ini didasarkan pada keputusan perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang adil dan etis dalam semua aspek operasionalnya. Prinsip CSR ini mendasarkan diri pada ketentuan hukum yang berlaku, mencerminkan ethical business pada masyarakat yang terkena dampak buruk langsung dari aktivitas Perusahaan (Wahyudi dan Azheri, 2008).

Tindakan yang tampak mendukung sebuah inisiatif dalam menciptakan dampak positif di masyarakat, yang dilakukan tanpa terikat pada kepentingan perusahaan

atau kewajiban hukum yang bersifat obligatoris (McWilliams, A. and Siegel, 2001). Praktik bisnis sukarela dan sumbangan sumber daya perusahaan yang dilakukan sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Kotler, P. and Lee, 2005).

Dalam kerangka bisnis, komitmen untuk berkontribusi pada kemajuan ekonomi berkelanjutan tercermin pada kolaborasi antara pegawai, kerabat, kelompok domisili, dan penduduk umumnya guna pembaharuan kualitas hidup (Corporate social responsibility World Business Council, 2005), seperti implementasinya tertuang dalam (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008), (Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, 2007), (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2009), (UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas, 2001), (Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, 2025) menjadi landasan dasar hukum CSR, bahwa perusahaan diberi mandat untuk mempertanggungjawabkan segala dampak dari aktivitas usahanya dalam ruang ekonomi, sosial dan lingkungan disebut sebagai triple bottom line (Busyra Azheri, 2012).

Dari konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa konsistensi badan usaha organisasi bisnis adalah komitmen yang tercermin dalam upaya memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal serta

nelayan pesisir kota melalui berbagai program penguatan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang.

Pengertian modal social, *social capital*, in its essence, is the presence of a specific collection of informal values or norms that are mutually embraced by members within a group, facilitating cooperative interactions among them. However, it is crucial to note that the mere sharing of values and norms does not automatically generate social capital, as the effectiveness of social capital hinges on the appropriateness of the shared values (Fukuyama, 1997). Artinya, modal sosial adalah kumpulan nilai atau norma informal yang dibagi di antara anggota kelompok, memfasilitasi kerja sama. Meskipun tidak otomatis menghasilkan modal sosial, karena nilai-nilai dapat tidak sesuai. Para ahli, seperti Fukuyama, telah menyumbangkan berbagai definisi untuk modal sosial, yang memiliki aksentuasinya pada resources yang melibatkan hubungan dan jaringan antar individu, kelompok, atau organisasi dalam masyarakat. Modal sosial ini membuktikan kegunaannya dalam pengembangan kognitif dan sosial masyarakat, serta memfasilitasi berbagai aktivitas sosial, termasuk menjalankan bisnis, melalui kerjasama yang mungkin karena faktor biologis yang mendasarinya.

Istilah lain menurut Fukuyama modal sosial adalah *In my perspective, the social capital approach provides a foundation for articulating a network in a more nuanced manner, allowing us to comprehend its true economic function. From this standpoint, a network is not merely a formal organizational structure, but rather, it signifies a moral bond built on trust: 'A network is a collective of individual agents who share informal norms or values that extend beyond those essential for routine market transactions* (Fukuyama, 1997).

Dalam perspektif diatas, konsep modal sosial memberikan landasan untuk merumuskan definisi yang lebih akurat terkait jaringan, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fungsi ekonominya. Menurut pandangan ini, sebuah jaringan tidak sekedar menentukan jenis organisasi formal, melainkan mencirikan sebuah hubungan moral berbasis kepercayaan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat lokal dan nelayan tradisional Tambak Osowilangun berlangsung secara tidak pasti, seiring dengan transformasi kehidupan menuju ciri-ciri masyarakat metropolis yang tengah berkembang. Perluasan pembangunan dermaga Teluk Lamong di wilayah pesisir kota mendorong percepatan urbanisasi ke arah pinggir. Secara umum, kondisi ini menimbulkan dampak yang kompleks, salah satunya adalah meningkatnya okupansi lahan pesisir seiring tingginya permintaan atas

tanah untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Akibatnya, banyak penduduk asli yang terdorong untuk melepaskan kepemilikan lahan mereka, yang kemudian dialih fungsikan menjadi bagian dari proyek pembangunan oleh pihak pemilik modal atau penguasa aset.

Dinamika perubahan sosial yang terjadi seiring dengan meningkatnya alih fungsi lahan oleh investor di tengah masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah keterbatasan alternatif kebijakan yang mampu memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat, serta lemahnya komunikasi yang aspiratif antara investor sebagai pemangku kepentingan dan warga terdampak. Akibatnya, ruang demokrasi masyarakat menjadi terbatas dan memunculkan potensi konflik, khususnya di kalangan masyarakat lokal dan nelayan tradisional. Banyak penduduk terpaksa tinggal di bantaran saluran irigasi karena ketidakmampuan ekonomi untuk membeli tanah pemukiman yang layak. Di sisi lain, situasi ini berdampak pada meningkatnya harga tanah di wilayah industrialisasi. Kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan

ruang hidup masyarakat pesisir dan memperkuat ketimpangan dalam agenda pembangunan.

1. Aspirasi Masyarakat Lokal dan Nelayan Tradisional terhadap Dampak Lingkungan dari Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong.

Pelabuhan Teluk Lamong didirikan sebagai rencana utama Negara dalam memperkuat kejayaan maritim Indonesia. Dalam upaya meningkatkan infrastruktur pelabuhan di Nusantara, Kementerian BUMN telah menunjuk empat Badan Usaha Milik Negara untuk mengambil peran dalam pembangunan dan pengembangan sejumlah sumber daya kedermagaan. Ada empat Persero badan usaha milik PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Kementerian BUMN, 2021).

Secara khusus, pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong PT. Pelindo III dilaksanakan dan dikembangkan di dermaga Teluk Lamong. Dalam pandangan pemerintah, lokasi pelabuhan Teluk Lamong ini bisa menjadi daerah terpadu dan zona industri. Pelabuhan-pelabuhan tua sedang diubah menjadi pelabuhan baru, dimarga pelabuhan Teluk Lamong dibangun seiring dengan upaya di Indonesia untuk mengatasi biaya logistik yang sangat tinggi; dan menjadi pusat pengiriman yang mampu bersaing dominasi negara Singapura. Pelabuhan di kawasan tersebut akan memiliki panjang dermaga total 6,4 kilometer. Beberapa bagian akan cukup dalam

untuk menampung kapal kargo besar dengan kapasitas hingga 100 ribu ton bobot mati. Pelabuhan ini diharapkan dapat mengurangi muatan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Peta areal terdampak pada Masyarakat lokal dan nelayan tradisional dapat dilihat pada Gambar 1. 1 Peta Terdampak dibawah ini :

Gambar 1.1 Peta Terdampak



Sejarahny di tahun 2011 pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Terminal Teluk Lamong mendapat resistensi dari sejumlah kelompok nelayan pesisir Kota Surabaya. Isu ini masih terus menjadi perhatian kuat masyarakat bawah (*groost roots*) di level

nelayan tradisional dengan dalih karena banyak masyarakat di sekitar yang hidupnya bertumpu pada sistem dan ruang ekologi pantai, terutama di area terdampak langsung, seperti nelayan Tambak Osowilangun, nelayan Romokalisari, nelayan Baranjangan, nelayan Kalianak yang menggantungkan hidup pada ekosistem laut di Teluk Lamong. Dampak sosial-ekonomi dari pasca pembangunan pelabuhan tersebut diatas berpotensi menyebabkan penurunan kesejahteraan rumah tangga masyarakat nelayan pesisir kota, seiring dengan kehilangan mata pencaharian. Meskipun demikian, terdapat fakta lain menarik di lapangan dengan menyatakan opsi dari banyak nelayan menolak proyek reklamasi Pelabuhan Teluk Lamong atas konstruksi pengetahuannya; bahwa fungsi ekologi-ruang pesisir pantai kota Surabaya menjadi penting untuk dijaga dan dilestarikan.

Berdasarkan beberapa informasi dari para informan dan key informan, bahwa temuan data mengenai pengetahuan dan aspirasi masyarakat terhadap Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong dapat dijelaskan melalui Tabel 1.1 Aspirasi Masyarakat Lokal dan Nelayan Tradisional yang tertera di bawah ini :

Tabel 1.1 Aspirasi Masyarakat Lokal dan Nelayan Tradisional

Pembangunan Dermaga Teluk Lamong	
Dampak	Keterangan
Penurunan Kualitas Lingkungan Masyarakat	Penurunan kualitas lingkungan di kawasan masyarakat lokal ditandai dengan seringnya terjadi banjir rob akibat luapan air laut, penurunan kualitas udara, serta perubahan garis pantai khususnya di wilayah pesisir Tambak Osowilangun, dan diluar area terdampak pesisir Tambak Sarioso, dan pesisir Romokalisari.
Okupansi Area Lahan Tangkap dan Akses Nelayan Tradisional	Alih fungsi lahan untuk pembangunan dermaga menyebabkan hilangnya area tangkap dan perubahan dalam cara produksi bagi nelayan tradisional, yang menggantungkan hidup pada ruang

	pesisir di kawasan Tambak Osowilangun.
Kerusakan Ekosistem Laut	Proses reklamasi dan pembangunan dermaga pelabuhan berdampak pada ruang ekologi laut di sekitarnya, termasuk penurunan kualitas lingkungan pesisir serta hilangnya habitat hewan air seperti udang, kepiting, dan kerang di kawasan pesisir Tambak Osowilangun.
Degradasi Sumber Daya Pesisir	Peningkatan aktivitas pelabuhan dapat memicu degradasi sumber daya pesisir, khususnya dalam konteks penggunaan lahan pantai oleh masyarakat lokal seperti nelayan tradisional dan petani tambak. Dampak ini semakin terasa pasca pembangunan, yang menyebabkan pendangkalan wilayah pesisir di

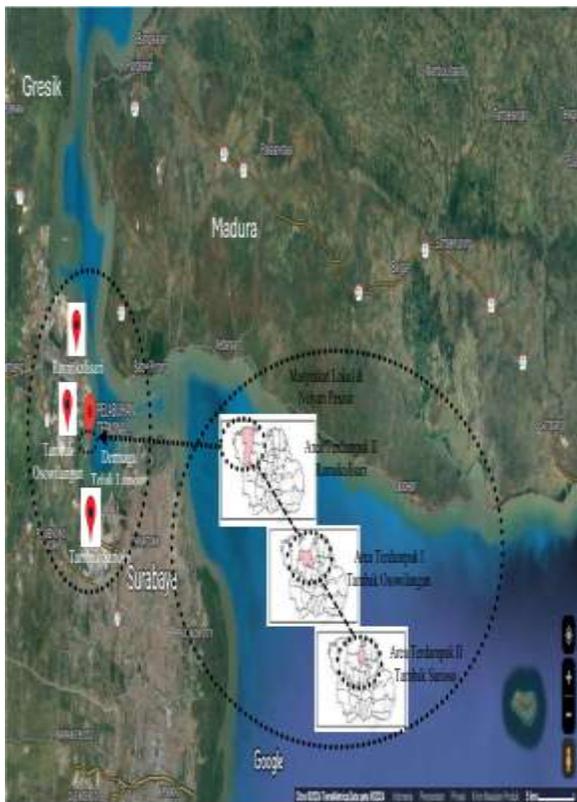
	area ruang tangkap nelayan Remokalisari, Tambak Osowilangun, dan Tambak Sarioso.
Peningkatan Kebisingan	Aktivitas operasional pelabuhan, seperti kegiatan bongkar-muat di gudang kontainer yang berdekatan dengan permukiman warga Tambak Osowilangun menimbulkan resistensi sosial karena menyebabkan peningkatan tingkat kebisingan dan mengganggu kenyamanan Masyarakat.
Peningkatan Polusi Udara	Kegiatan operasional pelabuhan, khususnya yang melibatkan mesin-mesin kapal dan kendaraan, dapat menyebabkan peningkatan suhu udara serta polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat lokal, termasuk

	nelayan tradisional dan petani tambak di kawasan Tambak Osowilangun.
Pendangkalan Pantai	Penurunan produktivitas wilayah dibandingkan dengan situasi sebelum pembangunan. Penurunan jumlah vegetasi mangrove turut memperparah situasi, karena mengancam habitat biota laut seperti ikan, kerang, dan kepiting, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan.
Beban Biaya Operasional Petani Tambak Menjadi Tinggi	Proses penggantian air laut yang sebelumnya dapat dilakukan secara tradisional melalui muara sungai, namun kini memerlukan bantuan mesin diesel akibat masuknya lumpur reklamasi dari Teluk Lamong yang menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan saluran

	<p>muara. Dampak serupa juga dirasakan oleh para petani garam, di mana kualitas hasil panen menurun akibat terganggunya pasokan air laut ke saluran produksi.</p>
--	---

(Sumber: Observasi Peneliti, 2022).

Untuk mengetahui peta area terdampak pada masyarakat lokal dan nelayan tradisional dapat dilihat Gambar 1.2 Peta Area Terdampak di bawah ini :



Berdasarkan Gambar 1.2 diatas bahwa pembangunan Dermaga Teluk Lamong membawa dampak yang luas terhadap wilayah pesisir di sekitarnya, yang dapat dipetakan ke dalam dua kategori utama: dampak internal dan dampak eksternal.

Secara internal, kawasan Tambak Osowilangun merupakan wilayah yang terdampak langsung. Masyarakat lokal dan nelayan tradisional di wilayah ini mengalami berbagai tekanan ekologis banjir rob ke pemukiman, dan sosial akibat alih fungsi lahan, pendangkalan saluran muara, tekanan sosial akibat masuknya aktivitas industri dan logistik ke kawasan permukiman. Serta rusaknya ekosistem pesisir, termasuk hilangnya vegetasi mangrove. Hal ini berpengaruh pada penurunan hasil tangkapan ikan, produktivitas tambak, dan meningkatnya biaya operasional bagi petani tambak.

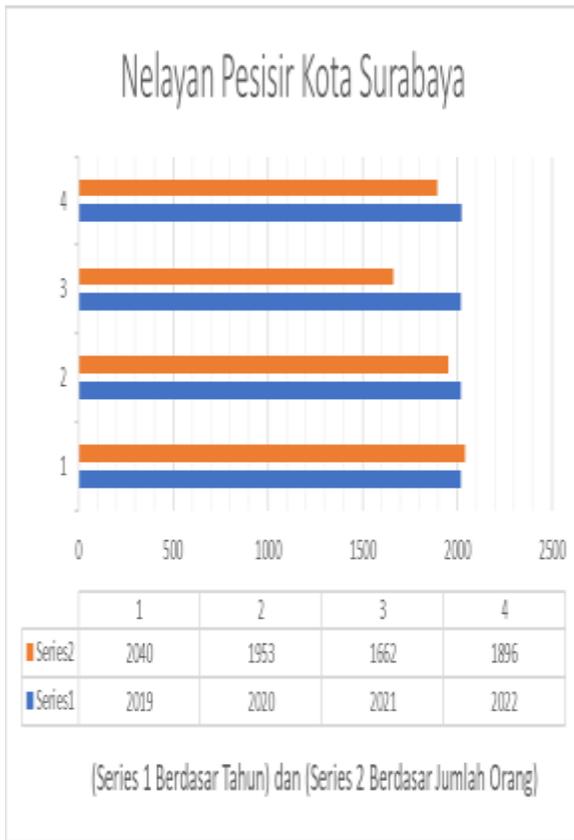
Secara eksternal, dampak pembangunan juga menjalar ke area sekitar seperti Romokalisari dan Tambaklagun. Meskipun tidak berada tepat di jantung proyek, wilayah ini merasakan efek ikutan berupa banjir rob, kenaikan harga tanah akibat spekulasi lahan, Selain itu, akses terhadap sumber daya laut juga terganggu karena perluasan ruang

pelabuhan membatasi ruang tangkap nelayan tradisional.

Dinamika pertumbuhan jumlah nelayan pesisir di Kota Surabaya dalam kurun waktu 2019 - 2022 mencerminkan perubahan sosial-ekonomi yang kompleks, terutama akibat pengaruh pandemi COVID-19. Untuk mengetahui dinamika pertumbuhan jumlah nelayan pesisir kota Surabaya dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini :

Grafik 1.1

Dinamika Perkembangan Nelayan Pesisir Kota Surabaya



(Sumber: Observasi Data Peneliti, 2022)

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa sejak sebelum pandemi, saat masa pandemi, hingga transisi menuju masa endemi (*new normal*), jumlah nelayan di pesisir Kota Surabaya menunjukkan pola atau trend grafik mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai problematika sosial yang kompleks. Sejak dimulainya pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong pada tahun 2011, telah terjadi penolakan dari masyarakat, khususnya nelayan tradisional, karena perubahan kultur ruang pantai yang selama ini menjadi basis kehidupan mereka, bergantung pada ekosistem pesisir. Perubahan ini menimbulkan dampak ekologis yang signifikan dan berpotensi menjadi masalah jangka panjang.

Di tingkat internal komunitas, hingga saat ini masih terdapat ketegangan dan fragmentasi antar kelompok nelayan dan masyarakat lokal. Berdasarkan hasil penelitian dan pernyataan dari informan kunci, problematika yang dihadapi oleh nelayan pesisir semakin terasa sejak akhir tahun 2019, menjelang pandemi, ketika mereka mulai mengalami tekanan akibat perubahan ekologi pantai. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah nelayan menurun secara signifikan karena berbagai pembatasan aktivitas dan penurunan produktivitas. Memasuki

tahun 2022 hingga 2023, meskipun terdapat kecenderungan pemulihan, proses tersebut berlangsung tidak merata. Menurut temuan data, program CSR yang dijalankan oleh PT Pelindo III di wilayah terdampak belum sepenuhnya terserap atau dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat pesisir untuk mencapai tujuan bersama *extractive policy* (Eugene J Kolb, 1978) sehingga diperlukan program pendampingan dan pemberdayaan dari perusahaan. Menurut (William D. Oberman, 2004) ada dua pendekatan teoritis yang dapat digunakan antara lain teori agensi dan teori berbasis sumber daya perusahaan.

2. Partisipasi Masyarakat Lokal dan Nelayan Tradisional dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Pelabuhan Teluk Lamong

Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam penilaian pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi suatu aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Salah satu proyek pelabuhan yang menjadi fokus utama adalah Pelabuhan Teluk Lamong di Kota Surabaya. Pelabuhan ini memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat sekitarnya, khususnya para nelayan yang bergantung pada sumber daya laut di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji partisipasi

masyarakat nelayan dalam konteks pembangunan pelabuhan serta peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh pelabuhan.

Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong di Kota Surabaya mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor maritim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pusat logistik yang strategis, memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Pelabuhan Teluk Lamong memiliki dampak signifikan terhadap nelayan di sekitarnya, menjadikan mereka salah satu kelompok yang paling terdampak oleh pembangunan tersebut. Penambahan infrastruktur pelabuhan dapat menyebabkan perubahan dalam pola tangkapan ikan dan akses ke wilayah penangkapan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat nelayan dapat menjadi faktor penting dalam menanggapi perubahan tersebut.

CSR oleh Pelabuhan Teluk Lamong menjadi suatu elemen yang signifikan dalam memitigasi dampak negatif pada masyarakat sekitar. Melalui kegiatan CSR, pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat hubungan

antara pelabuhan dan komunitas lokal, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Terdapat tiga argumentasi penting yang mendasari perlunya partisipasi masyarakat lokal dan nelayan tradisional dalam implementasi *program Corporate Social Responsibility (CSR)* Pelabuhan Teluk Lamong PT. Pelindo III dalam pemanfaatan wilayah pesisir kota :

Pertama, pendekatan partisipatif diperlukan untuk memperoleh informasi yang holistik mengenai kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat lokal dan nelayan tradisional. Tanpa keterlibatan aktif dari mereka, program pembangunan dan proyek-proyek perusahaan berisiko tidak efektif atau bahkan gagal mencapai tujuannya.

Kedua, partisipasi masyarakat berperan penting dalam membangun kepercayaan terhadap program pembangunan. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika proyek, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil dari program tersebut.

Ketiga, keterlibatan masyarakat lokal dan nelayan pesisir, baik yang berada di wilayah terdampak langsung maupun di luar area tersebut, menjadi semakin mendesak. Hal ini sejalan dengan berkembangnya pandangan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian dari

hak demokratis yang fundamental dan tidak dapat diabaikan.

Program CSR Dermaga Teluk Lamong yang pernah dijalankan oleh perusahaan PT. Pelindo III sejak tahun 2015-2018 dapat dijelaskan melalui Tabel 2.1 tertera di bawah ini :

Tabel 2.1 CSR Dermaga Teluk Lamong PT. Pelindo III

CSR Dermaga Teluk Lamong PT. Pelindo III	
Environmental Program	Konsep <i>go green</i> diimplementasikan sebagai upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman 11.000 bibit mangrove di kawasan pelabuhan.
Goals	Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan merawat kelestarian lingkungan perlu terus ditingkatkan. Namun, implementasi program yang ada saat ini masih belum mencapai tingkat keberlanjutan yang

	diharapkan.
Education Program	Program ini memberikan bantuan peningkatan jenjang pendidikan kepada tiga puluh delapan anggota masyarakat melalui program Kejar Paket C atau setara dengan sertifikat Sekolah Menengah Atas (SMA), yang berlokasi di sekitar area terdampak. Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan berupa sumbangan buku dari PIPP kepada tiga lembaga keagamaan dan sekolah anak-anak.
Goals	Implementasi program ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan bersama. Namun, pelaksanaannya masih bersifat momentum dan

	belum berkelanjutan.
Clean Sea Program	Program ini melibatkan partisipasi aktif warga yang tinggal di sekitar area terdampak pembangunan Dermaga Teluk Lamong.
Goals	Kegiatan ini diikuti oleh beberapa perwakilan kelompok nelayan lokal untuk menjaga kebersihan perairan laut sekitar, dalam mewujudkan komitmen bersama Implementasi program belum berkelanjutan.

(Sumber : Observasi Peneliti, 2022).

Berdasarkan Tabel 2.1 menunjukan tanggapan dan partisipasi masyarakat merupakan indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program CSR. Partisipasi ini mencakup inisiatif pengembangan sektor ekonomi lokal, termasuk pemberdayaan pelaku usaha kecil yang masih bersifat momentum. Untuk mengoptimalkan program tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif dan sinergi

yang kuat antara perusahaan dan masyarakat. Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa respons masyarakat lokal, dan nelayan tradisional, terhadap pemanfaatan bantuan CSR yang berbasis kebutuhan lokal masih relatif rendah, bersifat situasional, dan belum berkelanjutan.

3. Kendala Masyarakat Lokal dan Nelayan Tradisional dalam Pelaksanaan Program CSR di Pelabuhan Teluk Lamong

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia kerap menjadi sorotan kritis, terutama disebabkan oleh berbagai kendala di tingkat implementasi. Salah satu persoalan mendasar adalah ketiadaan rancangan induk (*master plan*) CSR serta minimnya peran aktif pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program CSR yang ditujukan bagi masyarakat lokal dan nelayan tradisional di wilayah terdampak Teluk Lamong cenderung bersifat *top-down*. Aspirasi masyarakat pesisir kurang mendapatkan ruang partisipatif dan hanya diposisikan sebagai pertimbangan sekunder dalam proses perencanaan.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai pengendali kebijakan *Political Social Responsibility* (PSR) seharusnya

memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi sosial-politik masyarakat melalui peran delegatif anggota legislatif. Oleh karena itu, penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya komunitas pesisir seperti nelayan tradisional dan warga lokal, idealnya dilakukan melalui pendekatan *bottom-up* agar program CSR benar-benar selaras dengan kebutuhan riil dan kearifan lokal masyarakat terdampak.

Berdasarkan hasil penelitian, suara aspirasi dan harapan dari Masyarakat lokal dan nelayan tradisional agar peran pemerintah lebih proaktif sebagai fasilitator, sehingga kolaborasi antara perusahaan pelaksana CSR dan masyarakat dapat berjalan secara sinergis, aspiratif, dan demokratis. Kritik dari terhadap pelaksanaan CSR juga ditujukan kepada perusahaan, khususnya menyangkut komitmen mereka dalam mewujudkan program yang berdampak nyata bagi Masyarakat terdampak.

Kendala yang dihadapi masyarakat lokal dan nelayan tradisional dalam implementasi Program CSR Demarga Teluk Lamong yang belum terakomodir oleh perusahaan PT. Pelindo III dapat dijelaskan melalui Tabel 3.1 *Implementasi Program Corporate Social Responsibility* (CSR) tertera di bawah ini :

Tabel 3.1

Kendala Masyarakat Lokal-Nelayan
Pesisir

<i>Kendala</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Perubahan Tatanan Sosial</i>	Peningkatan aktivitas pelabuhan dapat membawa perubahan dalam tatanan sosial, termasuk pergeseran nilai-nilai budaya antara masyarakat lokal dan nelayan tradisional. Selain itu, terdapat potensi terjadinya isolasi sosial, sementara tingkat penyerapan tenaga kerja dari warga Tambak Osowilangun sebagai area terdampak masih sangat rendah.
<i>Pergeseran Mata Pencarian</i>	Pergeseran dalam struktur ekonomi lokal telah menyebabkan perubahan mata pencarian bagi Masyarakat lokal, termasuk nelayan tradisional, petani tambak, dan kelompok lainnya yang kehilangan sumber penghidupan di kawasan pesisir

	Tambak Osowilangun, diluar area terdampak Romokalisari, dan Tambak Sarioso.
--	---

(Sumber : Observasi Peneliti, 2022).

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas penilaian kendala Masyarakat lokal-nelayan pesisir pada implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara aspiratif dari masyarakat lokal dan nelayan tradisional terhadap penilaian program CSR di Pelabuhan Teluk Lamong menunjukkan bahwa pelaksanaannya dinilai belum menyentuh akar persoalan serta belum mampu menghadirkan solusi yang substantif. Program CSR dianggap belum merata, hanya menysasar tujuan-tujuan khusus, dan belum bersifat berkelanjutan dalam konteks pemberdayaan serta kemandirian masyarakat terdampak. Di samping itu, pelaksanaan CSR di wilayah ini juga belum mengadopsi pola kemitraan yang sinergis sejak tahap perencanaan awal. Akibatnya, berbagai keputusan penting sering kali diambil secara sepihak belum melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal.

Permasalahan dalam pelaksanaan CSR yang menysasar masyarakat pesisir dan nelayan tradisional kerap kali disebabkan oleh tidak adanya mekanisme penilaian kebutuhan secara

partisipatif. Selain itu, program CSR yang berfokus pada pembangunan fisik dinilai tidak selalu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, melainkan lebih berpihak pada kepentingan internal. Meskipun perusahaan pelabuhan telah melibatkan diri dalam kegiatan sosialisasi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kontraktual berdasarkan regulasi pemerintah, tetap diperlukan pendekatan yang lebih holistik agar kesejahteraan masyarakat lokal dapat benar-benar ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua kesimpulan temuan yang dapat disimpulkan antara lain :

Pertama, bentuk aspirasi masyarakat pesisir dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pelindo III Terminal Teluk Lamong masih menghadapi berbagai tantangan meliputi penurunan kualitas lingkungan, kehilangan lahan dan akses tradisional, kerusakan ekosistem laut, konflik sumber daya, peningkatan kebisingan, dan peningkatan polusi udara. Melalui kegiatan CSR, partisipasi perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat hubungan dengan komunitas lokal, serta berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan dapat mengurangi dampak negatif yang telah diidentifikasi di area peta terdampak dan diluar area terdampak sekitarnya.

Kedua, kendala yang dihadapi masyarakat pesisir dengan pelaksanaan program CSR Terminal Teluk Lamong PT Pelindo III di Kota Surabaya dinilai belum menyentuh akar persoalan dan menghadirkan solusi yang substantif. Program CSR dianggap belum merata, hanya menysasar tujuan-tujuan khusus, dan belum bersifat berkelanjutan dalam konteks pemberdayaan serta kemandirian masyarakat terdampak, mulai dari perubahan tatanan sosial dan pergeseran mata pencaharian masyarakat lokal serta nelayan tradisional. Tantangan pelaksanaan CSR berupa ketiadaan rancangan induk pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai ekosentris dan antroposentris secara seimbang dalam mendukung pemberdayaan masyarakat terdampak.

SARAN

Saran hasil penelitian ini menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat pesisir dalam setiap tahap program CSR PT Pelindo III. Diperlukan pendekatan partisipatif, komunikasi dua arah untuk menjaring aspirasi warga, serta kebijakan berbasis kebutuhan lokal guna memastikan keberlanjutan, relevansi, dan keadilan sosial dalam implementasi program CSR di wilayah pesisir.

REFERENSI

Béjia, R., Yousfib, O., & Omri, and A. (2021). *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: A Cognitive Approach*. *Arxiv*, 2. <https://doi.org/https://doi.org>

- g/10.48550/arXiv.2102.09218
- Bent Flyvbjerg, Nils Bruzelius, W. R. (2003). *Megaprojects and Risk An Anatomy of Ambition* (First publ). Cambridge University Press.
- Busyra Azheri. (2012). *Corporate Social Responsibility Dari Volunntary Menjadi Mandatory* (Kedua). Raja Grafindo Persada.
- Chairil N. Siregar. (2007). Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Sositoknologi, Vol. 6 No.(CSR)*, 285–288.
<https://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/issue/view/141>
- Corporate social responsibilityWorld Business Council. (2005). *Corporate social responsibility*.
- Daniel Lathrop, L. R. (2010). Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice. In Laurel Ruma and Julie Steele (Ed.), *Tweet Congress: Build an App, Start a Movement* (p. 177). O'Reilly Media, Inc.
- Eugene J Kolb. (1978). *A Framework for Political Analysis*. Prentice Hall.
- Fukuyama, F. (1997). *Social Capital*. Oxford University Press.
- Gastil, J. (1998). *Democracy in Small Groups: Participation, Decision Making, and Communication*. New Society Publishers.
- Joan Sangster. (2008). Telling Our Stories: Feminist Debates and the Use of Oral History. In Barbara Harrison (Ed.), *Life Story Research* (First publ, p. 142). Sage Publications.
- Johannes Muller. (2006). *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian BUMN. (2021). *Bertransformasi empat BUMN*. 0boGBAgBG Ae6BgYIAhABGAqSBxE0LjEwLjExLjYuMi4xLjEuMaAHqsQBsgcR Mi4xMC4xMS42LjluMS4xLjG4B_JTwgcLMC4xNS4xNy4zLjHIB68B
- Kotler, P. and Lee, N. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Cause*. John Wiley & Sons, Ltd. Published.
- Kurt, I. F. and R. E. (2019). Determinants to the implementation of corporate social responsibility in the maritime industry: a quantitative study. *Journal Of International Maritime Safety, Environmental Affairs, And Shipping*, 3(1), 10–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/25725084.2018.1563320>
- Loekman Soetrisno. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius.
- Manohar Pawar. (2014). *Social and Community Development Practice* (A. S. and D. V. Shambhu Sahu, Alekha Chandra Jena (ed.); First publ). Sage Publications India Pvt. Ltd.
- McWilliams, A. and Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. *Academy of Management Review*, 26/1, 117–

- 127.
- Michael Ekow Manuel. (2018). WMU Studies in Maritime Affairs Vol. 5. In Lisa Loloma Froholdt (Ed.), *Corporate Social Responsibility in the Maritime Industry* (p. 253). Springer.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-69143-5>
- Paul M Brewerton, L. J. M. (2001). *Organizational Research Methods: A Guide for Students and Researchers* (First publ). SAGE Publications Ltd.
- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pub. L. No. Nomor 19 Tahun 2003 (2025).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/doi/uu-1-tahun-2025>
- Rachman. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Penebar Swadaya.
- Richard Welford. (2007). Priorities for Corporate Social Responsibility: a Survey of Businesses and their Stakeholders. *Wiley InterScience*, 15(Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt.), 52–62.
<https://doi.org/10.1002/csr.166>
- Robin Wooffitt, S. W. (2006). *Interaction in interviews*", In *Talk and Interaction in Social Research Methods* (eds. Paul Drew, Geoffrey Raymond, Darin Weinberg (ed.)). Sage.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.
- Susan N. G. Geiger. (2014). Women's Life Histories: Method and Content. *Chicago Journals, Volume. 11, 336*.
<http://www.jstor.org/stable/3174056>
- Trundle; Catherinee and, & Phillips, T. (2023). Defining focused ethnography: Disciplinary boundary-work and the imagined divisions between 'focused' and 'traditional' ethnography in health research - A critical review. *Social Science & Medicine*, 332/116108, 1–10.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116108>
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (2009).
<https://www.minerba.esdm.go.id/upload/ebook/20180706103602.pdf>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pub. L. No. Pasal 14, 10 (2008).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, Pub. L. No. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 (2007).
<https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan->

- berkelanjutan/UU_PT_No_40_tahun_2007.pdf
- UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas, Pub. L. No. UU No. 22 Tahun 2001 (2001).
<https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/uu-22-2001.pdf>
- Wahyudi dan Azheri. (2008). *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Setara Press.
- William D. Oberman. (2004). A Framework for the Ethical Analysis of Corporate Political Activity. *Business and Society Review*, 9(2), 245–262.
<https://doi.org/DOI:10.1111/j.0045-3609.2004.00194.x>